

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini sebagai bentuk implementasi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 ini memberikan gambaran terhadap rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) Tahun dan bertujuan untuk mencapai visi dan misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

Dalam penyusunan dokumen ini tentunya masih perlu ada perbaikan untuk menuju kesempurnaan dan menjadi tugas kedepan bagaimana mewujudkan laporan kinerja sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas berdasarkan data dan informasi secara akuntabel serta menjadi wajah secara keseluruhan dari Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dipedomani sebagai acuan peningkatan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

Kepala BNN Provinsi Jawa Barat



M. Arief Ramdhani, S.I.K.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 Km² menurut Data BPS Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 50.025 Juta Jiwa. Penduduk ini tersebar di 27 Kabupaten/Kota, 626 Kecamatan dan 5.962 Desa/Kelurahan. Sehingga dengan luas wilayah dan penyebaran penduduk perlu dilakukan strategi dalam penanganan narkoba di wilayah provinsi Jawa Barat. BNN mencatat adanya peningkatan angka prevalensi penyalahguna narkoba pernah pakai sebesar 1,95% di tingkat nasional tahun 2021 menjadi hanya 1,73% penyalahguna narkoba di tahun 2023, sehingga terdapat penurunan sebesar 0,22% yang artinya dari 10.000 orang penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun terdapat 173 orang diantaranya terpapar narkoba selama satu tahun terakhir atau setara dengan 3,33 juta jiwa penduduk berumur 15-64 tahun. Secara umum angka prevelensi setahun pakai dan pernah pakai laki-laki lebih tinggi dibandingkan Perempuan, angka prevelensi penyalahgunaan narkoba satu tahun terakhir pada laki-laki di tahun 2023 adalah 2,41% yang artinya dari 10.000 orang penduduk laki-laki berumur 15-64 tahun terdapat 241 orang diantaranya terpapar narkoba selama satu tahun terakhir. Angka prevelensi penyalahgunaan narkoba selama satu tahun terakhir pada Perempuan tahun 2023 adalah 1,03% yang artinya dari 10.000 orang penduduk perempuan berumur 15-64 tahun terdapat 103 orang diantaranya terpapar narkoba selama satu tahun terakhir. Dalam hal pemakaian jarum suntik, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemakai narkoba menggunakan jarum suntik terbanyak mencapai 20% dari seluruh pemakai narkoba di Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 13.608

jiwa, dan sisanya atau berkisar 54.433 jiwa mengkonsumsi narkoba dengan cara non suntik, Di Jawa Barat tepatnya di Kota Bandung terdapat cukup banyak pengguna narkoba jarum suntik, pengguna narkoba jarum suntik di Kota Bandung didominasi oleh pemakai suboxone (mengandung narkoba golongan III Buprenorfina). Dalam menangani permasalahan narkoba, strategi yang digunakan yaitu melalui strategi demand reduction dan supply reduction. Demand reduction yaitu tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat agar mereka imun terhadap penyalahgunaan narkoba sedangkan supply reduction adalah tindakan penegakan hukum yang tegas dan terukur agar sindikat narkoba jera. Strategi demand reduction yang dilakukan adalah melalui kegiatan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi. Kegiatan Pencegahan yang dilakukan berupa kegiatan Desa bersinar, advokasi, sosialisasi dan kampanye Stop Narkoba, sedangkan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan TOT, Workshop dan tes urine sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Sementara untuk kegiatan di bidang rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan rehabilitasi, pascarehabilitasi dan konseling dengan tujuan membimbing klien untuk memelihara pemulihannya agar tidak relapse dan mempersiapkan diri agar mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan kegiatan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat dengan tujuan lembaga rehabilitasi tersebut dapat memberikan pelayanan kepada para penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkoba. Sementara untuk strategi supply reduction dilakukan melalui kegiatan penyelidikan untuk mendapatkan informasi awal tentang jaringan peredaran narkoba.

Fasilitas Rehabilitasi yang ada di lingkungan BNN Provinsi Jawa Barat hanya terdapat 70 Fasilitas sehingga penyalahguna/pecandu yang mengakses layanan tersebut baru sebanyak 4.402 jiwa atau hanya 6,47%.

2. Hasil Evaluasi

Pada tahun 2023 BNN Provinsi Jawa Barat telah melakukan Penandatanganan perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 11 stakeholder di wilayah Jawa Barat.

Kemudian melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya Program Pemberdayaan Alternatif, Program Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba dan Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Pendidikan telah terbentuk 260 Penggiat Anti Narkoba, Pelaksanaan test urine (OPD, instansi vertical, lingkungan swasta dan lingkungan pendidikan) dengan total 38 OPD/1.785 ASN dan 1.402 Orang, Program Desa Bersinar di 2 Desa, program Desa Pesisir Tangguh Bersih Narkoba sebanyak 6 Desa, Program Ketahanan Keluarga sebanyak 4 kali, Pelatihan Pengembangan Soft Skill sebanyak 3 kali, Informasi Edukasi melalui Insert Konten sebanyak 5 kali, Informasi Edukasi melalui Media Luar Ruang sebanyak 3 Paket, Informasi Edukasi melalui Media Cetak sebanyak 20 kali, Informasi Edukasi melalui radio daerah yaitu Radio Rase FM dan MGT, Selain itu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat juga melaksanakan kegiatan Non DIPA diantaranya melaksanakan Sosialisasi P4GN kepada lingkungan Pendidikan, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat sebanyak 61 kali dengan total peserta sebanyak 15.489 orang.

Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Barat melalui Klinik Pratama BNNP Jawa Barat telah memberikan layanan rehabilitasi rawat jalan kepada 196 klien, pelayanan SKHPN sebanyak 446 orang, program

pendampingan pemulihan sebanyak 54 orang, ada 15 lembaga rehabilitasi yang mendatangkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BNNP Jawa Barat dan sudah operasional, melakukan bimbingan teknis kepada 6 lembaga rehabilitasi, melakukan asistensi kepada 2 lembaga, Pelaksanaan Sertifikasi/Uji Kompetensi untuk 15 orang Petugas Rehabilitasi, juga melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 50 orang.

Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Barat pada tahun 2023 berhasil memetakan 2 jaringan sindikat narkoba yang merupakan jaringan yang berskala nasional dengan mengungkap 51 kasus tindak pidana narkoba (LKN), juga bidang pemberantasan membangun sinergitas dengan Polda Jawa Barat khususnya Direktorat Narkoba, Bea Cukai Provinsi Jawa Barat dan Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Provinsi Jawa Barat.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional;
7. Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional;

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2020-2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi Jawa Barat bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kabupaten/Kota	1.285.000.000

2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	14 Kabupaten/Kota	1.604.700.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	14 Kabupaten/Kota	3.285.632.000
NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	84.600.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	3,1 Indeks	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	226.575.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Operasional di Wilayah Provinsi	4 Lembaga	2.558.993.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	30 Unit	
7.	Pascarehabilitasi Penyalahguna	Meningkatnya upaya pemulihan	Persentase penyalahguna	68	228.775.000

	dan/atau Pecandu Narkoba	penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	%	
8.	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitasi rehabilitasi BNN	3,29 Indeks	
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	22 Berkas Perkara	920.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
10.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta jaringan	220.000.000
11.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 % 100 %	271.280.000
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	98,5 Indeks 14 Kabupaten/ Kota	20.078.100.000
13	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran Jumlah BNN Kabupaten/Kota	87 Indeks 10	198.331.000

			di wilayah Provinsi dengan NKA mencapai target	Kabupaten/Kota	
14	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	83 Indeks	-

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah provinsi Jawa Barat, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	2 Lembaga
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1 Kelompok Masyarakat

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	10 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNN Kabupaten/Kota	120 Orang
			Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan narkoba (SKHPN)	650 Orang
7.	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	70 Orang
8.	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitasi rehabilitasi BNN		
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertical) Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	10 Perkara
10.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	3 Laporan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
11.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	1. Nilai Tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	25 Orang
		2. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika (unit vertical)	2 Produk
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen
		2. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Perkantoran	12 layanan
13.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2 Dokumen
		2. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan NKA mencapai target	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen
14.	Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertika	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	-	-